

LAPORAN UJI PETIK

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Proses pelaksanaan siklus masyarakat dalam program KOTAKU merupakan kegiatan yang harus dikawal pelaksanaannya karena serangkaian kegiatan siklus merupakan pondasi keberlanjutan program kedepannya. Pelaksanaan siklus pemilihan ulang anggota LKM yang dimulai pada triwulan ketiga perlu dikendalikan proses pelaksanaannya agar setiap tahapan proses yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara pemilihan. Target pengurangan kumuh tahun 2019 seluas 103.95 juga menjadi perhatian OSP 7 tentu saja dengan melihat ketersediaan BPM 2019 yang hana untuk 3 kelurahan maka tentu saja perlu mencari alternatif sumber pembiayaan oleh BKM/LKM untuk penanganan kumuh, oleh karena itu OSP ingin memastikan sejauh mana capaian kolaborasi yang telah dicapai oleh BKM/LKM agar target 0 ha kumuh tahun 2019 dapat tercapai. Salah satu permasalahan yang juga banyak ditemui adalah pemeliharaan terhadap infrastruktur yang telah dibangun oleh KSM. Ketidak berfungsinya kelompok pemeliharaan dan pemanfaat menjadi salah satu penyebab utama tidak terpeliharanya sarana dan prasarana yang telah terbangun. Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai sistem pengendalian program harusnya terdokumentasikan dan tersampaikan kepada masyarakat agar masyarakat semakin tahu dan paham tentang program KOTAKU dan dapat menimbulkan partisipasi dari masyarakat. Selain itu Kelembagaan BKM juga menjadi fokus OSP untuk ditingkatkan kinerjanya dari data penilaian kinerja kelembagaan BKM/LKM bahwa mayoritas BKM/LKM memiliki hasil penilaian yang sudah mandiri.

2. Tujuan Uji Petik

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka tujuan dilaksanakannya uji petik adalah :

- Memastikan partisipasi masyarakat efektif dalam memberikan control pada Pelaksanaan KOTAKU;
- Memastikan kegiatan penanganan kumuh berjalan melalui platform kolaborasi;
- Memastikan kualitas Pelaksanaan KOTAKU sesuai prosedur yg telah ditetapkan;

- Memastikan pemeliharaan dan pemanfaatan terhadap infrastruktur yang telah dibangun;
- Memberikan dukungan teknis untuk menyelesaikan permasalahan dan isu yang terjadi pada tahapan pelaksanaan.

3. Rekapitulasi Lokasi uji petik

Sesuai dengan latar belakang dan tujuan pelaksanaan uji petik maka pemilihan lokasi uji petik adalah di kelurahan-kelurahan yang telah ditentukan sesuai dengan masalah yang akan di gali. Adapun kelurahan/desa lokasi uji petik pada triwula ke dua ini sebagai berikut :

No	Kota/Kabupaten	Kelurahan	Materi Uji Petik
1	Balikpapan	Baru Ulu	a. Akses informasi dan Akuntabilitas b. kolaborasi penanganan kumuh tingkat kelurahan c. Pemeliharaan dan pemanfaatan (KPP) d. Kelembagaan LKM
2	Balikpapan	Margasari	a. Akses informasi dan Akuntabilitas b. kolaborasi penanganan kumuh tingkat kelurahan c. Pemeliharaan dan pemanfaatan (KPP) d. Kelembagaan LKM
3	Balikpapan	Muara Rapak	a. Akses informasi dan Akuntabilitas b. kolaborasi penanganan kumuh tingkat kelurahan c. Pemeliharaan dan pemanfaatan (KPP) d. Kelembagaan LKM
4	Paser		a. Akses informasi dan Akuntabilitas b. kolaborasi penanganan kumuh tingkat kelurahan c. Pemeliharaan dan pemanfaatan (KPP) d. Kelembagaan LKM
5	Paser	Senakan	a. Akses informasi dan Akuntabilitas b. kolaborasi penanganan kumuh tingkat kelurahan c. Pemeliharaan dan pemanfaatan (KPP) d. Kelembagaan LKM
6	Paser		a. Akses informasi dan Akuntabilitas b. kolaborasi penanganan kumuh tingkat kelurahan c. Pemeliharaan dan pemanfaatan (KPP) d. Kelembagaan LKM

B. REVIEW CAPAIAN PELAKSANAAN KOTAKU

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
1.	Kegiatan Kelembagaan	6 kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemiliha ulang anggota LKM di kelurahan Tanah Grogot dilakukan secara berjejang dari tingkat basis (RT) tetapi tidak menggunakan sistim pemilihan tertutup tetapi voting. 2. Tidak ada tata tertib terkait proses pemilihan serta kesepakatan jumlah utusan dari masing-masing basis (RT) 3. Proses pemilihan di basis menggunakan sistim cluster (kelurahan Baru Ulu) sehingga keterlibatan penduduk dalam proses pemilihan tidak sesuai dengan aturan (AD) yakni minimal 75% penduduk dewasa terlibat dalam proses pemilihan ulang anggota LKM. 4. Anggaran dasar belum ada perubahan yang menyesuaikan dengan tupoksi LKM dalam penanganan kumuh serta belum dicatatkan di 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada tata tertib yang mengatur tentang tata cara pemilihan ditingkat basis. 2. Lemahnya Pengendalian tim faskel dalam pelaksanaan proses pemilihan ulang LKM. 3. LKM belum menjadikan anggaran dasar sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan termasuk dalam proses pemilihan ulang LKM. 4. Tim korkot dan tim faskel kurang pendampingan dalam pelaksanaan review AD dan fasilitasi pencatatan ke notaris. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan untuk RT yang belum melaksanakan pemilu basis agar proses pemilunya menggunakan sistim tertutup. 2. Tim faskel memfasilitasi proses review Anggaran Dasar LKM dengan menyesuaikan Tupkosi LKM terkait penanganan dan pencegahan. permukiman kumuh 3. Tim faskel memfasilitasi proses pencatatan anggaran dasar LKM ke Notaris.

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
			notaris.		
2.	Akses Informasi dan Akuntabilitas	6 kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada sistim pengelolaan informasi dan masalah di LKM 2. LKM belum mempunyai buku pengaduan masyarakat. 3. Pengelolaan Informasi dan masalah belum tersosialisasikan kepada masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan informasi dan masalah belum dianggap LKM sebagai sebuah masukan dalam pengelolaan program. 2. LKM belum memahami mekanisme dan alur penyampaian serta pengelolaan informasi dan masalah. 3. Masih lemahnya pengendalian tim faskel terkait pengelolaan informasi dan masalah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKM wajib memiliki buku pengaduan serta semua pengaduan wajib dicatatkan dalam buku pengaduan 2. Tim faskel memberikan penguatan kepada LKM terkait tata cara pengelolaan informasi dan masalah. 3. Pendampingan pengelolaan informasi dan masalah oleh tim faskel minimal sekali seminggu.
4	Kinerja pelaksanaan kolaborasi	6 kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolarosi belum by design dimana kegiatan kolaborasi yang ada di kelurahan baik itu dari dana Reses Dewan mapun dari dana APBD dan CSR bukan dari sistim kolaborasi yang dibangun oleh LKM. 2. Masih banyak dana kolaborasi yang dilaksanakan di luar lokasi deliniasi kumuh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistim kolaborasi belum terbangun di LKM sehingga dana kolaborasi yang adamasih bersifat accident. 2. Forum kolaborasi tingkat kelurahan sampai tingkat kota belum berjalan dan berfungsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengaktifkan keberadaan forum kolaborasi ebagai penggerak kolaborasi mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat kota/kabupaten.

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
5	Efektifitas kerja KPP	6 kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara kelembagaan kelompok pemelihara dan pemanfaat sudah terbentuk dan di SK kan oleh Lurah/Kepala Desa tetapi belum efektif dalam menjalankan tupoksinya. 2. Belum ada sumber pembiayaan ya rutin dan jelas untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana r yang sudah dibangun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok pemelihara dan pemanfaat belum memahami tugas peran serta fungsinya dengan baik sehingga secara kelembagaan tetapi belum ada rencana kerja untuk kegiatan pemeliharaan. 2. Belum direncanakan mekanisme kegiatan pemeliharaan jika ada kerusakan pada sarana dan prasarana yang sudah dibangun selama ini masih mengandalkan kerja bakti dan gotong royong untuk pemeliharaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim faskel dan tim korkot memberikan coaching/penguatan kepada KPP agar memahami tupoksinya. 2. Tim faskel memfasilitasi KPP dalam menyusun rencana kerja serta rencana sumber dana pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah dibangun.
6	Pengelolaan Keuangan	6 kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKM kelurahan Muara Rapak membetuk unit baru yaitu unit pengelolaan pegadaian (UPP) dengan sumber dana dari hasil laba UPK sebagai modal awal. 2. Tingkat kemacetan dana UPK di kelurahan Baru Ulu dan Margasari relatif tinggi. 3. Di kelurahan Tanah Grogot dan desa Tanah Priok kegiatan pinjaman bergulir di suspend karena 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKM berharap dapat memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan menjaminkan barang atau surat berharga lainnya. 2. Tidak berjalannya mekanisme tanggung renteng di KSM menyebabkan banyak anggota KSM yang menunggak untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim faskel dan tim korkot melakukan kajian ulang terhadap UPP yang dibentuk apakah fungsinya tidak sama dengan UPK yang sama-sama menjalankan kegiatan simpan pinjam. 2. Dilakukan proses penagihan dengan

NO.	TOPIK	CAPAIAN Kuantitatif	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
			<p>tingginya tingkat kemacetan di KSM serta kekhawatiran LKM untuk menggulirkan dana UPK yang masih ada di rekening karena takut terjadi kemacetan juga.</p>	<p>membayar pinjamannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Proses seleksi terhadap kelompok peminjam yang tidak berjalan dengan baik 4. Verifikasi proposal kelompok peminjam dana UPK kurang berjalan dengan baik 	<p>membentuk tim yang akan melakukan penagihan dana UPK yang macet di KSM.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Agar dana pinjaman bergulir yang ada di UPK segera digulirkan melalui mekanisme yang benar dengan melakukan seleksi yang ketat kepada kelompok serta calon peminjam. 4. Melakukan verifikasi yang detail terhadap proposal pengajuan pinjaman bergulir dari KSM.